

THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT TOWARDS EDUCATION IN THE 3T REGION AT JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN THE KALI PARE AREA, MALANG DISTRICT

Adinda Putri Setiasih¹, Kiki Widya Sari², Riza Nur Rahmat³, Sri Untari⁴

Universitas Negeri Malang^{1,2,3,4}

adinda.putri.2307128@students.um.ac.id¹, kiki.widya2307128@students.um.ac.id²,
riza.nur.2307128@students.um.ac.id³, sri.untari.fis@um.ac.id⁴

ABSTRAK

Peran pemerintah pada dasarnya adalah mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wilayah Malang merupakan daerah yang cukup luas, baik dari segi dataran maupun pegunungan. Dengan wilayah yang luas, masih terdapat wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang dapat ditemui di Kabupaten Malang, tepatnya di Kalipare. Peran pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan tidak semata-mata sebagai pemutus sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai jembatan (penghubung) untuk memastikan keputusan pemerintah pusat dapat direalisasikan dengan cepat dan akurat. Hal yang sering terjadi dalam kebijakan pendidikan adalah ketidakcukupan kebijakan dalam jenjang pendidikan, di mana sering ditemui infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar yang masih kurang memadai. Penyebab utama kesenjangan dibidang pendidikan adalah kurangnya informasi atau kebijakan daerah yang mengutamakan pendidikan. Hal ini dipengaruhi dengan minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga para pendidik harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, inovasi dalam kebijakan sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, ada dua macam inovasi kebijakan, yaitu adaptif dan instruktif. Adopsi inovasi adaptif memungkinkan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sedangkan inovasi instruktif memberikan panduan yang lebih ketat dan terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua jenis inovasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pendidikan, Kebijakan Publik, 3T Dan Kesenjangan.

ABSTRACT

The role of the government is basically to improve the welfare of society in accordance with the ideals contained in the 1945 Constitution. The Malang region is a fairly large area, both in terms of plains and mountains. With a large area, there are still 3T areas (underdeveloped, frontier and outermost) that can be found in Malang Regency, specifically in Kalipare. The role of regional government in realizing policies is not solely as a breaker in the government administration system, but also as a bridge (liaison) to ensure that central government

decisions can be realized quickly and accurately. What often happens in education policy is the inadequacy of policies at the educational level, where educational infrastructure and teaching staff are often found to be inadequate. The main cause of disparities in education is the lack of information or regional policies that prioritize education. This is influenced by the lack of training for teaching staff carried out by the regional government, so that educators have to wait their turn to receive training. Therefore, innovation in policy is very necessary for local governments. Theoretically, there are two types of policy innovation, namely adaptive and instructive. Adoption of adaptive innovation allows policies that are flexible and responsive to change, while instructive innovation provides stricter and more structured guidance in implementing policies. Both types of innovation are important to ensure that education policies can effectively meet society's needs.

Keywords: Local Government, Education, Public Policy, 3T And Inequality.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan pendidikan, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, dengan kualitas pendidikan yang lebih baik maka anak bangsa dapat meningkatkan kemampuan serta dapat memajukan kualitas anak Indonesia. Pendidikan merupakan serangkaian proses yang dilakukan suatu negara dalam rangka menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan bangsa yang berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptakan ketahanan nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan dan memiliki kemauan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus (Saputri,2021).

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan juga merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilaksanakan, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintahan daerah. Pendidikan tidak akan lepas dari aktor-aktor pendidikan yang terlibat dalam kegiatan akademik. Oleh sebab itu, peranan dari unsur politik

daerah, terutama di bidang pendidikan, tidak hanya sekedar rencana , melainkan suatu hal yang nyata. Apalagi, pendidikan merupakan hal yang sangat wajib bagi anak-anak bangsa Indonesia. Secara politik ada lembaga sendiri yang menaungi masalah pendidikan di Indonesia. Dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di jelaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, lembaga yang memang menaungi dunia pendidikan pasti akan mengeluarkan kebijakan yang akan mempengaruhi dan meningkatkan kualitas belajar para peserta didik. Namun, secara realita pasti ada daerah pelosok yang terletak jauh dari pusat administrasi pendidikan, sehingga memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut M. Idrus (2012), jumlah pulau yang ada di Indonesia sekitar 1.700 pulau. Pulau-pulau mandiri ini mewakili tantangan dan peluang masa depan bagi Indonesia. Hambatan geografis ini menimbulkan tantangan dalam menyediakan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam baik secara geografis maupun sosial budaya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pendidikan.

Wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah 3T menurut Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria sebagai berikut : a. perekonomian masyarakat, b. sumber daya manusia, c. sarana dan prasarana, d. kemampuan keuangan daerah, e. aksesibilitas, dan f. dan karakteristik daerah. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal.

Dari pengertian diatas masalah pendidikan dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur yang paling memiliki keterpengaruh dalam suatu wilayah bisa dikategorikan sebagai daerah tertinggal adalah sumberdaya manusia yang secara teoritis memang benar dan pasti. Sumberdaya manusia pada dasarnya memang bisa dibentuk dengan berbagai macam cara berupa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun kebijakan presiden, Pada hakikatnya banyak sekali berbagai macam bentuk dari 3 T mulai dari penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan Pendidikan.

Secara fakta di lapangan, unsur utama yang dapat mempengaruhi wilayah dapat dikategorikan sebagai wilayah 3T. Menurut pendapat Fajeri (2021), wilayah 3T biasanya terpengaruh oleh beberapa faktor, termasuk belum meratanya infrastruktur digital ,

ketidaksiapan pendidik dalam materi ajar, dan belum tersedianya perangkat untuk melaksanakan proses pendidikan secara daring. Harapan agar digitalisasi pendidikan dapat diwujudkan dengan memperkenalkan lingkungan pembelajaran jarak jauh di lembaga pendidikan tampaknya masih jauh dari kenyataan. Perlu diperhatikan bahwa akses Internet tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah terutama daerah pelosok Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu wilayah yang dapat dikategorikan sebagai 3T merupakan hasil dari ketidaksetaraan dalam berbagai aspek, mulai dari keterjangkauan wilayah atau akses, sumber daya masyarakat, hingga faktor-faktor lainnya. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah, melalui kebijakan maupun program, untuk meningkatkan kehidupan dan perekonomian agar wilayah-wilayah tersebut tidak lagi menjadi wilayah 3T.

Dari segi geografis, wilayah Malang, kabupaten maupun wilayah kota, memiliki bentuk pegunungan. Hal ini membawa potensi kelebihan dan kekurangan. Wilayah kabupaten, termasuk Kabupaten Malang, memiliki luas wilayah yang lebih besar. Sebagai contoh, wilayah Kalipare memiliki luas sekitar 190 km persegi berdasarkan data dari BPS Kabupaten Malang. Kondisi lingkungan yang berupa pegunungan dapat memengaruhi perkembangan wilayah, terutama dalam bidang pendidikan. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Malang tinggi (sekitar 59.545 jiwa menurut data tahun 2019), tantangan seperti ketidaksetaraan akses dan sumber daya perlu diperhatikan agar wilayah tersebut tidak tertinggal.

B. METODE PENELITIAN

Untuk membahas hal-hal diatas maka pada karya ilmiah ini menggunakan metode keperpustakaan yang dimana menurut pendapatnya (Khatibah, 2011) menjelaskan bahwa penelitian keperpustakaan merupakan suatu kegiatan penelitan yang dilakukan oleh peneliti adalah membaca dan mempelajari buku-buku kemudian disimpulkan. Tidak perlu meneliti, baca saja sejumlah buku yang berhubungan dengan objek penelitian kita adalah berbentuk buku, dokumen, naskah kuno dan non cetak. catatan sejarah, atau keberhasilan peradaban. Dengan demikian maka penelitian yang menggunakan metode keperpustakaan bisa dipahami sebagai penelitian yang berfokus kepada suatu obyek yang berupa buku, E,jurnal, catatan sejarah ataupun yang lainnya yang obeknya berupa media cetak dan akan menghasilkan suatu karya baru yang bersumber dari karya atau penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Kebijakan Publik

Dunia akademik berperan penting dalam membentuk kebijakan publik untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk dalam pendidikan. Kebijakan publik, berasal dari kata Yunani “polis” berfokus pada metode pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab agensi. Ini berbeda dari konsep organisasi, bersifat formal. Penelitian akademik membantu dalam pemecahan masalah dan mendefinisikan alternatif, secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan kebijakan Hill, L. W. (2006). Kebijakan publik bertujuan untuk mengurangi perbedaan obyektif dan subjektif untuk secara efektif memecahkan masalah publik, dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan publik Davis, D. J. (2008). Kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan sangat penting untuk kemitraan yang sukses, memberikan keahlian analisis data yang berharga untuk pengambilan keputusan yang terinformasi di sektor publik. Keterlibatan akademik dalam perumusan kebijakan membutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara ide-ide akademik dan aplikasi praktis, menekankan pentingnya jaringan, reputasi, dan harapan.

Fungsi utama sebuah kebijakan pada dasarnya adalah berusaha mencapai tujuan. Namun pada realitanya fungsi dari kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari untuk menggantikan tugas atau proses lain untuk menggantikan tugas atau peraturan perundang-undangan. (Umar & Widyawati, 2019) dengan demikian jika sebuah kebijakan dikaitkan dengan dunia pendidikan maka akan memiliki pengaruh yang besar dan di landasi oleh sebuah unsur konstiusi indonesia yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan di imbangi oleh pemerintah dan para menteri. Pada dasarnya pemerintah berusaha mewujudkan sebuah tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Untuk suatu wilayah bisa dikategorikan sebagai wilayah yang kurang dalam dunia Pendidikan maka banyak sekali unsur yang bisa mempengaruhinya, (Suparno, 2014) ada beberapa unsur yang bisa mempengaruhi sebuah wilayah bisa di kategorikan kurang dalam dunia Pendidikan diantaranya adalah sumberdaya manusia yang memiliki pengaruh terbesar dalam berbagai macam aspek indikator yang lainnya, secara umum sumberdaya manusia yang memiliki kualitas yang bagus maka akan mempengaruhi unsur unsur yang lain mulai dari unsur kesejahteraan masyarakat lokal ataupun kondisi perekonomian masyarakat. Dari pendapat tersebut maka dapat di pahami bahwa peranan Pendidikan yang baik dan bagus atau

layak dalam suatu wilayah sangatlah diperlukan. Hal ini juga harus diimbangi dengan berbagai macam aspek, mulai dari segi sumber daya manusia tantag kesejahteraan dan lain sebagainya.

Pemerataan dalam mengembangkan sumber daya manusia pada dasarnya harus pihak-pihak yang terlibat, baik itu dari pihak pemerintah daerah ataupun kemauan masyarakat itu sendiri. Dilihat dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas Tentang Pemerintahan Daerah, anggaran dalam belanja daerah pada dasarnya harus diutamakan hal ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang mana pada dasarnya memiliki sebuah tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk perbaikan pelayanan, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitator. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya memiliki sebuah fungsi utama yaitu diantaranya adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas.

Daerah 3T

Wilayah Indonesia merupakan sebuah wilayah negara yang pada dasarnya memiliki terbentuk dari berbagai macam pulau dan dipisahkan oleh lautan, secara peraturan perundang undangan juga di jelaskan bahwa wilayah Indonesia terbagai atas provinsi pada tahun 2024 ini memiliki 38 provinsi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pemerintahan daerah guna pemeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menjadi sebuah cita-cita bangsa. Wilayah 3T adalah singkatan dari daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Adanya penggolongan wilayah seperti ini dikarenakan sistem pembangunan yang tidak merata. Kategori dari wilayah ini ialah wilayah yang masih sangat memerlukan bantuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya (Rira & Sinding, 2023). Idealnya pemerintah harus lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut guna dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang merata.

Hambatan utama dalam mencapai cita-cita bangsa adalah persebaran kesejahteraan salah satu unsurnya adalah bidang Pendidikan. Pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) tentunya berbeda dengan pendidikan yang berada di daerah yang sudah maju, menurut survei kemendikbud yang telah dilakukan mengatakan bahwa pembelajaran di wilayah 3T masih terkendala (Ambarita & Yuniati, 2020). Hal ini sungguh disayangkan karena

seharusnya seluruh masyarakat tanpa terkecuali bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dan merata untuk kemajuan bangsa. (Tommy et al., 2018) juga menjelaskan bahwa Pendidikan adalah penentu arah kemana bangsa ini dapat dibawa. Jika proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara lancar, maka bangsa ini berpotensi menjadi bangsa yang kuat terutama dalam hal Pendidikan, memiliki jiwa yang berbudi luhur, halus akan pengetahuan maka bangsa ini tidak akan kekurangan akan para cendekiawan yang mana bisa dijadikan panutan agar cita-cita bangsa tercapai. Dengan demikian maka peranan dari dunia Pendidikan diimbangi oleh pemerintah daerah yang selalu membuat suatu kebijakan yang tepat sangatlah dibutuhkan karena jika dikaji lebih mendalam (Tommy et al., 2018) juga berpendapat bahwa Faktor-faktor yang dapat dapat menjelaskan mengapa upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan lambat atau tidak berhasil, hal ini dipengaruhi terkait dengan pengembangan strategi. Pertama pengembangan pendidikan yang pengembangannya lebih berorientasi pada input. Kedua, pembangunan pendidikan semakin berorientasi secara makro, terbukti dengan adanya pendidikan kewarganegaraan pada tingkat yang lebih tinggi. menjadi lebih berorientasi makro, sebagaimana dibuktikan dengan pendidikan kewarganegaraan tingkat tinggi.

Kesenjangan Pendidikan

Peranan dari pendidikan pada dasarnya merupakan satu pemahaman mengenai suatu unsur keilmuan yang sifatnya logis dan dilaksanakan disebuah instansi tertentu untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan pada dasarnya belum tahu menjadi tahu. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya pasti akan ada kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan suatu keputusan yang ditujukan mengenai kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran. (Idrus, 2018) menjelaskan bahwa kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan tingkat kabupaten atau kota dengan wilayah 3 T diantaranya adalah perbedaan yang cukup mencolok dalam kualifikasi guru di daerah tertinggal. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru cenderung dengan cara yang tidak terstruktur dan tidak menggunakan teori-teori pembelajaran yang efektif. Fenomena bisa terjadi dikarenakan peningkatan kompetensi seorang pengajar belum menjadi fokus pembangunan pendidikan. Selain itu dalam realitasnya peranan seorang guru juga sangat minim akan pengembangan diri baik itu melalui sebuah pelatihan yang diselenggarakan instansi tertentu ataupun dari instansi dinas pendidikan, padahal hal ini tergantung pada kemampuan mereka mengajar di sekolah.

Tantangan yang dihadapi oleh guru di bidang Pendidikan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan dalam kompetensi mereka, sangat signifikan Salvador, R., dkk (2022). Pelaksanaan program pelatihan guru memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi guru, tetapi ada masalah dengan penyebaran informasi dan efektivitas pelatihan tersebut. Dalam beberapa kasus, guru di wilayah 3 T mungkin tidak menerima informasi tepat waktu tentang peluang pelatihan, yang menyebabkan potensi kesenjangan dalam kesiapan dan pemahaman mereka tentang konten. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali metode yang digunakan untuk pelatihan guru untuk memastikan bahwa pendidik dipersiapkan dan didukung secara memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka secara efektif .

Kesenjangan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan juga bisa terjadi di bidang akses menuju sekolah dan infrastruktur sekolah dengan demikian maka dapat dipahami bahwa di bidang Pendidikan akses dan infrastruktur (Benediktus, 2015) juga menjelaskan bahwa untuk kesenjangan yang terjadi di lapangan bisa dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah akses Pendidikan, pengajar dan infrastruktur, untuk akses Pendidikan di wilayah daerah yang bisa diaktegorikan tertinggal biasanya memang akses kesekolah sangatlah menjadi suatu permasalahan klasik hal ini bisanya terjadi karena untuk menuju sekolah biasanya cukup sulit hal ini di sebabkan karena jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh dan jalan yang kurang memadai. Yang kedua adalah faktor pengajar, seperti diketahui bahwa pengajar merupakan salah satu hal utama dalam aktor pendidikan, sehingga peranan pengajar dalam hal ini merupakan unsur utama mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana terdapat setidaknya tujuh indikator atau faktor yang menyebabkan suatu mutu pendidikan menjadi rendah, yang dari permasalahan tersebut menyebabkan wilayahnya tergolong ke dalam wilayah 3T, diantaranya sebagai berikut.

1. Sarana Prasarana yang rendah. Beberapa contoh di antaranya ialah banyaknya gedung sekolah dan fasilitas sekolah yang tidak layak pakai, penggunaan fasilitas pendidikan yang tidak mencukupi, buku perpustakaan yang tidak memadai.
2. Kualitas guru rendah. Yang dimaksud dalam hal ini ialah tingkat profesionalisme guru yang kurang maksimal sehingga hanya mampu mengajar tapi tidak mumpuni dalam mendidik.

3. Prestasi siswa rendah. Lemahnya sarana prasarana dan kualitas guru menyebabkan minat belajar siswa rendah, yang berdampak pada prestasi siswa rendah.
4. Kurangnya pemerataan pendidikan ke semua daerah (Zulkarnaen & Handoyo, 2019).

Kemudian unsur berikutnya yang bisa mempengaruhi adalah infrastuktur sekolah yang mana pada dasarnya dalam peraturan peundang undangan juga sudah jelas bahwa untuk anggaran Pendidikan berjumlah 20% dari semua jumlah anggaran belanja negara namun sangat disayangkan anggaran sebesar itu kadang masih kurang untuk memaksimalkan infrastuktur Pendidikan yang mana memang banyak di pengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga bagi sekolah yang dikategorikan tertinggal sedikit mendapatkan anggaran pembangunan infrastuktur yang memadai.

Kesenjangan Pelaksanaan Kebijakan

Pada bidang kebijakan pendidikan, peran kebijakan tidak hanya untuk membuka jalan bagi administrasi tetapi untuk bertindak sebagai jembatan bagi implementasi yang cepat, mengatasi kesenjangan yang mungkin timbul karena berbagai pengaruh seperti sumber daya manusia Iqbal, M., Fahmi, D., Nasution, D. R., & Dalimunthe, N. H. (2023). Untuk memastikan kebijakan terwujud secara efektif, inovasi memainkan peran penting, terutama di sektor pendidikan, di mana ia bertindak sebagai katalis untuk implementasi kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia Ambreen, M. (2022). Integrasi inovasi dalam proses kebijakan publik dapat meningkatkan hasil pendidikan dengan menyediakan akses mudah ke sumber daya yang beragam dan menumbuhkan kreativitas dalam mengatasi kesenjangan dan tantangan yang ada Al Laban, F., Reger, M., & Lucke, U. (2022). Oleh karena itu, mendorong inovasi dalam kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dilaksanakan secara efisien tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sistem pendidikan.

Pada bidang pendidikan, inovasi memainkan peran penting dalam membentuk kualitas dan efektivitas metode pengajaran dan hasil pembelajaran Dutchak, I. (2023). Inovasi pendidikan mencakup beragam kemajuan, termasuk inovasi pedagogis, ilmiah, teknologi, dan administrasi Phillips, C., & Shaw, I. (2011). Implementasi inovasi dalam sistem pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan tahap interaksi dan pengembangan yang baru secara kualitatif dalam praktik pedagogis. Selain itu, keterlibatan staf akademik dalam menciptakan,

memperoleh, dan menerapkan inovasi sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pendidikan pada peserta didik. Dengan menggabungkan metode tradisional dan inovatif dalam pelatihan pekerja sosial, lembaga pendidikan tinggi dapat memastikan kualitas dan efektivitas layanan sosial dan proses pendidikan. Pada akhirnya, merangkul metodologi pengajaran yang inovatif tidak hanya meningkat.

Inovasi Instruktif dalam pendidikan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bergantung pada peraturan legislatif seperti keputusan presiden dan undang-undang. Huda, S., Sugandi, Y. S., & Sumadinata, W. S. (2023). Peraturan ini harus selaras dengan otonomi daerah untuk memastikan koherensi dalam pengambilan keputusan, terutama di bidang-bidang seperti pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Yusra, H., & Sinaga, A. (2023). Kebijakan yang bersifat instruktif memainkan peran penting dalam memandu keputusan pemerintah daerah, menekankan indoktrinasi arahan pemerintah pusat di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah 3T memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, menyoroti pentingnya kebijakan instruktif di wilayah ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan publik maupun peraturan daerah (perda). Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mencakup kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan yang utama adalah bidang pendidikan. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan di bidang pendidikan harus mendapat perhatian serius. Daerah yang patut diperhatikan antara lain adalah daerah pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang sangat membutuhkan peran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kesenjangan yang terlihat dalam konsep daerah 3T biasanya meliputi beberapa hal, seperti jarak, kondisi jalan, dan infrastruktur masyarakat, dengan penekanan khusus pada pendidikan. Kesenjangan yang sering terjadi di lapangan biasanya berkaitan dengan akses jalan ke wilayah 3T, yang menjadi fakta lapangan yang harus dihadapi. Untuk merealisasikan kebijakan, dibutuhkan hukum positif sebagai dasar pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Salah satu jenis kebijakan, yaitu adaptif,

memiliki kelebihan dari berbagai macam unsur, baik itu dari sistem administrasi maupun realisasi kebijakan.

Saran

Peranan kebijakan publik pada dasarnya memiliki fungsi untuk memaksimalkan otonomi daerah. Namun, kadang masih ada kebijakan publik yang lebih fokus pada kondisi ekonomi masyarakat, sehingga bidang lain, seperti pendidikan, sering kali tidak tersentuh. Penerapan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat memang merupakan salah satu masalah klasik, tetapi sebaiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan unsur pendidikan. Terutama di wilayah tertinggal dan wilayah 3T yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah. Aktor utama dalam pendidikan adalah guru yang berinteraksi langsung dengan anak-anak bangsa yang memiliki potensi besar. Namun, tidak sedikit ditemukan bahwa para pendidik ini memiliki kekurangan dalam pengalaman, yang dapat diatasi dengan pelatihan profesi guru untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Laban, F., Reger, M., & Lucke, U. (2022). Closing the Policy Gap in the Academic Bridge. *Education Sciences*, 12(12), 930.
- Ambarita, J., & Yuniati, E. (2020). *PAK dan Covid-19 Problematika Pembelajaran PAK Daerah Tertinggal*. Penerbit Adab.
- Ambreen, M. (2022). PLANNING AND IMPLEMENTATION ISSUE OF EDUCATIONAL POLICIES: DOMESTIC BREACHES. *Pakistan Journal of Social Research*, 4(03), 256-266.
- Benediktus, H. dan R. (2015). *KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA*. [Http://Journal.Unpad.Ac.Id/Prosiding/Article/View/13533](http://Journal.Unpad.Ac.Id/Prosiding/Article/View/13533), 2(2).
<http://infojambi.com/topik-utama/8306-potret-dunia-pendidikan-merangin-ada->
- Davis, D. J. (2008). Policy research and the sociology of education: Contributions to understanding the experiences of marginalized populations. *Journal of Thought*, 43(3-4), 9-20.

- Dutchak, I. (2023). Innovative Forms of Work in Educational Institutions in the Conditions of Martial Law (on the Example of Chernivtsi Region). *Problems of Education*, (1 (98)), 280-298.
- Fajeri. (2021). ANALISIS PEMBELAJARAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DAERAH 3T (NUSA TENGGARA TIMUR). *Https://Jp.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/JP/Index*, 12(1).
<https://jp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JP/index>
- Hill, L. W. (2006). Political and Academic Linkages in Public Sector Policymaking. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 11(1), 221-231.
- Huda, S., Sugandi, Y. S., & Sumadinata, W. S. (2023). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 519-528.
- Idrus, M. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(2).
<https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603>
- Iqbal, M., Fahmi, D., Nasution, D. R., & Dalimunthe, N. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Membangun Karakter di MAN 1 Deli Serdang. *Journal on Education*, 5(2), 3431-3436.
- M Idrus. (2012). MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH. *Https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 1(2).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1177659>
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang. Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres-no-63-tahun-2020>
- Phillips, C., & Shaw, I. (2011). Innovation and the practice of social work research. *British Journal of Social Work*, 41(4), 609-624.
- Salvador, R., Limon, M., Borromeo, C. M., Parinas, M. A., Manrique, L., de la Cruz, L., & Dalere, J. M. (2022). Exploring technical-vocational education teachers' challenges and

- adaptation strategies in teaching courses outside their specializations. *Journal of Technical Education and Training*, 14(2), 34-48.
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, II(2), 2019. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1100300&val=16519&title=Analisis%20Inovasi%20Kebijakan%20Daerah%20dalam%20Rangka%20Pengurangan%20Kesenjangan%20Wilayah>
- Suparno. (2014). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. [https://Ejournal.Umm.Ac.Id/5\(1\)](https://Ejournal.Umm.Ac.Id/5(1)).
- Rira, Penni., & Sinding, Riska Reti. (2023). REVITALISASI MUTU PENDIDIKAN DI WILAYAH 3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 354-363.
- Tommy, M., Putera, & Rhussary, M. (2018). PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH 3T (TERDEPAN, TERPENCIL DAN TERTINGGAL) DI KABUPATEN MAHAKAM HULU. <https://Journals.Umkt.Ac.Id>.
- Umar & Widyawati. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH THD PEND ISLAM: Vol. pertama (Ahmad Choirul Rofiq, Ed.; Rofiq). CV. Nata Karya Jl. Pramuka 139.
- Vikin, S., 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan . <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/viewFile/17349/16741#:~:text=Strategi%20yang%20>
- Yusra, H., & Sinaga, A. (2023). Sosialisasi Pembelajaran Inovatif dengan Strategi Literasi di SMP se-Kabupaten Batanghari. *BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 27-31.
- Zulkarnaen, & Handoyo, A. D. (2019). Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 1(20–23).